

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU
(Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)**

SKRIPSI

DIDIK FATKHUR ROHMAN

0610313049



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

MALANG

2012

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 13 November 2012
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Didik Fatkhur Rohman

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (Studi
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)

dan dinyatakan lulus
MAJELIS PENGUJI

KETUA

Dr. Imam Hanafi, S. Sos. M. Si.

NIP. 19691002 199802 1 001

ANGGOTA

Drs. Minto Hadi, M. Si.

NIP. 19540127 198103 1 003

ANGGOTA

ANGGOTA

Prof. Dr. Agus Suryono, MS.

NIP. 19521229 197903 1 003

Drs. Siswidiyanto, MS.

NIP. 19600717 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 7 Agustus 2012



Nama : Didik Fatkhur Rohman
NIM : 061 031 3049

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Khoirunnas Anfa'uhum Linnas
dan semoga aku seperti itu

RINGKASAN

Didik Fatkhur Rohman, 2012, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang), komisi pembimbing, Ketua: DR. Imam Hanafi, S.Sos. M. Si. MS; Anggota: Drs. Minto Hadi, M. Si. 145 halaman + xii.

Berkaitan dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Kota Malang yang menjadi Kota Pendidikan, Industri, dan Pariwisata maka selalu bertambah pula jumlah penduduk yang menjadi pendatang dan tak jarang pula menjadi penduduk tetap. Hal ini mendorong untuk di lakukannya pencatatan data kependudukan yang baik karena data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sebab penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu melalui Sensus Penduduk dan Registrasi Penduduk.

Dalam pencatatan sipil diperlukan juga pelayanan yang baik sehingga bisa mempercepat proses pencatatan sipil dengan baik dan benar. Dengan demikian, perlu diadakan penelitian guna menunjang pengembangan proses pencatatan sipil dengan baik dan benar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan secara terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. (2) Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan administrasi.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian mencakup Implementasi kebijakan administrasi kependudukan terpadu dalam memberikan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Malang. Kebijakan administrasi kependudukan terpadu dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan dasar KTP yang meliputi : dasar kebijakan atau peraturan yang dipakai, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan KTP, dokumen administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Kebijakan sentralisasi pengurusan kartu tanda penduduk merupakan langkah maju Pemerintah Kota Malang terutama dalam bidang pelayanan publiknya untuk merapikan sistem administrasi kependudukannya ke dalam satu tempat terpadu untuk memudahkan pemerintah Kota Malang dalam memetakan masyarakatnya sehingga dalam membuat kebijakan yang lain memiliki data yang kongkret dan valid. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu di Kota Malang masih kurang informasi kepada masyarakat pemohon atau pihak yang mengajukan Kartu Tanda Penduduk sehingga masyarakat kurang tahu apa saja persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembuatan KTP baru ataupun memperpanjang KTP yang lama.

SUMMARY

Rohman, Didik Fatkhur, 2012, **Implementation of Integrated Population Policy Administration Service** (Study in the Departement of Population and Civil Registration of Kota Malang), counselor commission, Supervisor: Drs. Minto Hadi, M.Si; Co-Supervisor Dr. Imam Hanafi, S.Sos, M.Si. 145 pages + xii.

In connection with the increase of population in Indonesia, particularly in the city of Kota Malang, a city of education, industry and tourism, it is always also increases the number of people who become migrants and not infrequently become permanent residents. It is encouraging to do a good recording demographic data, because demographic data is needed and the planning and evaluation of development, as well as residents of the subject and object of development. Population data can be obtained in several ways, namely through the census of population and population registration.

In civil registration required also good service so that it can speed up the process of civil registration properly. The formulation of the problem in this study were: (1) How is the implementation of population policy in an integrated administrative service in providing services to people in the department of population and civil Kota Malang (2) What factors could be driving and inhibiting the implementation of policy administration services.

The research is descriptive qualitative approach. The focus of the research include in the implementation of an integrated populations administration policies in providing public service in the department of population and civil registration in the city of Kota Malang. Population administration policies integrated in this study focuses on basic services ID card that included: basic policies or rules used, this authority and responsibility of the implementing organization, procedure ID card service, administrative documents, as well as the factors supporting and inhibiting the implementation policies and administrative services secondary data. Data collection techniques is by observation, interview and documentation, while the analysis of data using an interactive model analysis.

The result of this study is to show that the policy of centralizing management of National Identity Card (KTP) is a step forward in the city of Kota Malang, especially in the field of public service, for a fixed residence administration system into one unified place for easy. Kota Malang city government in mapping the community, so in making policy others have concrete and valid data. The conclusion of this research that the implementation of integrated population policy administration services Kota Malang city still lack the information to the applicant or the applicant identity card (KTP) so that people do not know what are the requirements needed in filling a new ID card or ID card to extend the old.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kekuatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang), yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua saya yang begitu luar biasa didikan dan pengorbanannya selama ini, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Sumartono MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. DR. MR Khairul Muluk S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. DR. Imam Hanafi, S.Sos. M. Si. MS, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Drs. Minto Hadi, M. Si, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Prof. Dr. Agus Suryono, MS, dan Drs. Siswidiyanto. MS, yang telah menjadi Dosen Penguji dalam ujian skripsi ini.

7. Drs. Rahman Nurmalia, MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
8. Ibu Suparti, SE, selaku Sekretaris Kepala Bagian Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data-data terkait penyelesaian skripsi ini.
9. Masyarakat Kota Malang atas kesempatan dan kerja sama yang telah dilakukan kepada penulis selama proses penelitian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabati di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Brawijaya dan RaFIA yang menjadi keluargaku di Kota Malang.
11. Sedulur-seduluri Himpunan Mahasiswa Malang Alumni BU yang menjadi sahabat terbaik dalam perjuangan mencari ilmu.
12. Teman-teman Wisma Putra Al-Hilal dan B60 yang luar biasa.
13. Adek-adekku; Vida, Diana, Naili & Alia yang selalu mendukung kakaknya ini dalam kebaikan. (Chaiyyoo cMunGuuut)
14. Seluruh pihak dan teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 7 Agustus 2012

Penulis.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	iii
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik	12
1. Pengertian Kebijakan Publik	12
2. Tahap-Tahap Dalam Pembuatan Kebijakan	13
3. Elemen Sistem Kebijakan	15
B. Implementasi Kebijakan	17
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	17
2. Model Implementasi Kebijakan	19
a. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn	20
b. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier	24
c. Model Merile S. Grindle	31
C. Pelayanan Publik	35
1. Pengertian Pelayanan Publik	35
2. Prinsip Pelayanan Publik	37
3. Bentuk Pelayanan	39
4. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	39
5. Standar Pelayanan Publik	40
D. Administrasi Kependudukan	42
1. Pendaftaran Penduduk	46
2. Pencatatan Sipil	48
3. Pengelolaan Informasi Kependudukan	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	54
B. Fokus Penelitian	55
C. Lokasi dan Situs Penelitian	56
D. Jenis dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Instrument Penelitian	60
G. Keabsahan Data	61
H. Analisa Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum	65
1. Gambaran Umum Kota Malang	65
a. Kondisi Geografis	65
b. Pemerintahan	68
c. Penduduk	71
2. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	72
a. Sejarah Singkat	72
b. Visi dan Misi	77
c. Struktur Organisasi	79
d. Tugas Pokok dan Fungsi	81
e. Tata Kerja	99
f. Program Kerja dan Kegiatan	100
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	103
1. Implementasi Kebijakan	103
a. Dasar Kebijakan	103
b. Wewenang dan Tanggung Jawab	107
c. Sumber Daya	111
d. Prosedur Pelayanan Pembuatan KTP	119
e. Dokumen Administrasi	123
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	127
a. Faktor Pendukung	127
b. Faktor Penghambat	128
C. Analisis dan Pembahasan	129
1. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi	129
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	140
B. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA	144
-----------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1	Tahap-Tahap Kebijakan Publik	14
2	Elemen Sistem Kebijakan	15
3	Pemetaan Model Implementasi Kebijakan	19
4	Model Proses Implementasi Kebijakan	23
5	Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier	30
6	Peta Kota Malang	65
7	Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang	78
8	Sturuktur Organisasi Dispenduk Kota Malang dan Jajaran Anggota	80
9	Lokasi Dinas Catatan Sipil di Kantor Terpadu	82
10	Loket untuk Masing-Masing Kecamatan	106
11	Sturuktur Organisasi Dispenduk Kota Malang	109
12	Alur Pengurusan KTP	119
13	Informasi Kependudukan di Mading Kantor Dispendukcapil	123

DAFTAR TABEL

No.	Nama	Hal.
1	Banyaknya Penduduk menurut Kecamatan dirinci menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin	4
2	Luas kecamatan dan persentase terhadap luas kota	68
3	Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Golongan dan Jenis Kelamin	70
4	Banyaknya Penduduk menurut Kecamatan dirinci menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin	71
5	Program dan Kegiatan Dispendukcapil Tahun 2009 – 2013	101
6	Uraian Tugas Staf Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang Periode tahun 2011- tahun 2012	112
7	Perlengkapan dan Sararana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang
3. Curriculum Vitae Peneliti
4. Pedoman Wawancara
5. Formulir Kartu Tanda Penduduk
6. Daftar Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang
7. Peraturan Daerah Kota Malang No. 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Peraturan Wali Kota Malang No. 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
9. Revisi Rencana Strategis 2009-2013 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang 2011